

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN
KEUANGAN PADA PT.ASKES (PERSERO) CABANG MAKASSAR**



UPTD	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Pengantar	13-11-07
Fakultas	Fak. Ekonomi
Departemen	1 des.
Halaman	H
No. Urut	634
No. Induk	SKR-E07

Oleh :

HUS-a

NAMA : HAFSAH HUSAIN
NO. INDUK : A31103723

**PROGRAM REGULER SORE FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN
KEUANGAN PADA PT.ASKES (PERSERO) CABANG
MAKASSAR**

Oleh :

**HAFSAH HUSAIN
A31103723**

Skripsi Sarjana Lengkap Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Hasanuddin

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs.Mansyur Sain,DESS.,AK

Pembimbing II



Dra. Darmawati.,AK

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK PERENCANAAN
KEUANGAN PADA PT. ASKES (PERSERO) CABANG
MAKASSAR**

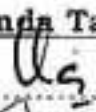
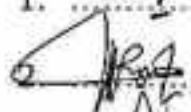

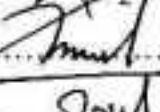
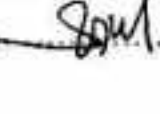
Oleh:

HAFSAH HUSAIN

NIM. A31103723

Telah Diuji dan Lulus Tanggal 10 AGUSTUS 2007

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. Mansyur Sain, DESS.,Ak	Ketua	1. 
2. Dra. Darmawati, Ak	Sekretaris	2. 
3. Drs. Rusman Thoeng, M.Com,Ak	Anggota	3. 
4. Dra. Hj. Nurleni, M.Si,Ak	Anggota	4. 
5. Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si	Anggota	5. 

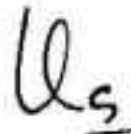
Disetujui oleh:

Program Reguler Sore
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua



Drs. H. Anwar Guricci, DESS

Tim Penguji
Jurusan AKUNTANSI
Fakultas Ekonomi UNHAS
Ketua,



Drs. Mansyur Sain, DESS.,Ak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya dukungan motivasi dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tuaku, tiada kata yang dapat mewakili rasa terimakasih ananda atas segala kasih sayang dan doa yang diberikan selama membesarkan ananda.
2. Bapak Drs.Mansyur Sains,Dess,Ak dan Ibu Dra. Darmawati,Ak, selaku pembimbing I dan pembimbing II, terimakasih atas segala nasehat dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Amiruddin M.Si,Ak, selaku ketua jurusan Akuntansi Unhas.
4. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis.
5. Bapak Nursalam selaku Kepala Keuangan dan seluruh karyawan PT.Askes yang telah membantu, mengizinkan dan memberikan data dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. BOM-BOM Alias "JELEK",special thanks for u bro, untuk semua bantuan dan dukungan yang sangat besar selama ini, sehingga skripsi ini bisa selesai dan

mencapai gelar sarjana. Dan my Brother yang lain..I Love u all..thanks atas supportnya. Buat temen2 seperjuanganku ama, kiki, emi, terimakasih buat semua bantuannya dan nasehatnya,dan teman-teman lainnya yang tak mungkin penulis sebutkan satu per satu, thanks for ur helps.

Seperti kata pepatah "tak ada gading yang tak retak", begitu pula dengan penulisan skripsi ini penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala saran dan kritik dari para pembaca sebagai perbaikan penulisan skripsi ini dengan senang hati. Semoga saja skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Amin

Wassallam

Makassar, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	7
2.1 Metode Penelitian.....	7
2.2 Jenis dan Sumber Data.....	8
2.3 Tempat Penelitian.....	8
2.4 Batasan Masalah.....	8
2.5 Metode Analisis.....	9
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	11
3.1 Pengertian Manajemen Keuangan	11
3.2 Pengertian Kinerja.....	13

3.3	Pengertian Perencanaan.....	15
3.4	Teknik Penyusunan Perencanaan.....	17
3.5	Analisis Kinerja Keuangan.....	20
3.6	Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juli 1989 tentang Peningkatan Efisiensi & Produktivitas Badan Usaha Milik Negara.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....		27
4.1	Sejarah PT.Askes (Persero).....	27
4.2	Struktur Organisasi.....	29
4.3	Kegiatan Usaha.....	34
4.5	Keadaan Personalia.....	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
5.1	Laporan Keuangan PT.Askes (Persero) Cabang Makassar.....	37
5.2	Kriteria Penilaian Kinerja PT.Askes (Persero) Cabang Makassar.....	41
5.3	Rasio Finansial.....	42
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....		48
6.1	Simpulan.....	48
6.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN.....		52

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Neraca Komparatif PT. Askes (Persero) Cabang Makassar Tahun 2005-2006.....	38
2. Perhitungan Laba/Rugi Komparatif PT. Askes (Persero) Cabang Makassar Tahun 2005-2006.....	39
3. Hasil Perhitungan Rasio-rasio Finansial pada PT. Askes (Persero) Makassar Tahun 2005-2006.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 740/KMK.00/1989.....	52

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian pasar adalah untuk memperoleh laba yang wajar dan mendorong pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam arti yang lebih luas organisasi perusahaan, didirikan terutama untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk beberapa maksud atau sasaran untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran itu dapat berbentuk finansial dan non finansial.

Pada dasarnya semua badan usaha baik besar maupun kecil dalam menjalankan aktivitasnya bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai atau menghasilkan laba yang maksimal serta mengalami perkembangan. Dengan semakin berkembangnya perusahaan baik swasta maupun pemerintah mengakibatkan bertambah besar dan rumitnya permasalahan yang harus dihadapi didalam pengelolaan perusahaan dan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk mengelola seluruh kegiatannya didalam perusahaan secara efisien dan efektif. Untuk itulah, maka perusahaan harus melakukan usaha-usaha dengan menciptakan sesuatu yang memungkinkan adanya peningkatan hasil perusahaan secara keseluruhan, misalnya dengan memperbaiki kualitas dari produksinya.

Manajemen selalu dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dimasa yang akan datang, dimana perubahan-perubahan besar yang terjadi dipengaruhi oleh antara lain persaingan internasional yang ketat, perusahaan-perusahaan asing biasa mengekspor produksinya atau membuka usaha di Indonesia, dan tidak diperkenankan lagi pemerintah memproteksi pengusaha-pengusaha, inovasi dan rekayasa bidang keuangan serta kurs pertukaran yang sangat berfluktuasi. Sehingga dalam mengambil keputusan utamanya yang berhubungan dengan tujuan perusahaan menjadi sangat kompleks bagi manajemen perusahaan. Dan manajer keuangan masa kini harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal jika ingin perusahaan yang dikelolanya tetap bertahan.

Kemampuan seorang manajer keuangan untuk beradaptasi dengan perubahan, mencari dana, menginvestasi aktiva serta mengelolanya secara bijaksana akan sangat mempengaruhi kesuksesan perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagaimana halnya seorang dokter mencoba mengetahui kondisi kesehatan seseorang begitu pula seorang manajer keuangan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kaitannya dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan diketahuinya kondisi keuangan perusahaan, keputusan yang rasional dapat dibuat dengan bantuan alat dan analisis tertentu. Analisis keuangan dapat dilakukan baik oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan.

Perusahaan sebagai salah satu unit ekonomi yang perlu memiliki program dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan sebagai lembaga ekonomi yang pada umumnya mengejar keuntungan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham,

dengan cara memaksimalkan nilai saham perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat dilingkungan perusahaan.

Untuk dapat menciptakan kesejahteraan perusahaan dituntut mampu memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan beroperasi pada tingkat produktivitas yang optimal. Dengan tujuan ini, tugas manajer keuangan adalah menciptakan kesejahteraan bagi para pemegang saham akan tercapai.

Perencanaan keuangan melibatkan proyeksi-proyeksi berdasarkan standard perkembangan dari umpan balik dan proses penyesuaian untuk memperbaiki prestasi kerja perusahaan. Perencanaan keuangan mencakup penjualan, laba, dan aktivitas yang didasarkan pada alternative strategi produksi dan pemasaran. Untuk kemudian menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan. Bila ternyata hasil actual tidak sesuai dengan proyeksinya, perencanaan keuangan harus dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan potensial yang mungkin akan memberikan hasil yang memuaskan.

Perencanaan keuangan biasanya berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan sumber dan penggunaan dana serta perencanaan pengeluaran modal berdasarkan kategori dan divisi atau lini bisnis. Rencana dan anggaran keuangan merupakan alat untuk memandu perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam melakukan penyesuaian yang segera terhadap perubahan dibidang ekonomi dan perubahan persaingan yang selalu terjadi di dunia bisnis.

Perencanaan yang telah ditetapkan akan mengalami proses pelaksanaan dan membutuhkan pengendalian agar kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengendalian sebagai salah satu dari fungsi manajemen yang pasti akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh suatu perusahaan, karena dengan demikian kepastian yang ingin dicapai dapat diketahui.

PT. Askes adalah suatu perusahaan pelayanan jasa yang berhubungan dengan kesehatan yang digolongkan sebagai suatu perusahaan yang besar yang tiap fungsi mempunyai keterkaitan-keterkaitan yang kompleks antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, baik pada saat perencanaan maupun dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan tidak lepas dari beberapa masalah, misalnya bagaimana manajer puncak mengarahkan dan mengontrol kegiatan setiap manajer perusahaan yang mempunyai fungsi tertentu, yang masing-masing mempunyai saling keterkaitan yang kuat. Untuk itu kegiatan perusahaan harus dikelola dengan terpandu antara semua manajer departemen dan harus diarahkan kepada pencapaian tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal ini tersebut diatas, maka salah satu perusahaan dapat dikendalikan. Hal ini berkaitan dengan tujuan perusahaan karena faktor biaya berpengaruh atas hasil atau pendapatan yang diperoleh dari operasi perusahaan. Dalam pencapaian dan peningkatan pendapatan diperlukan sumber dan penggunaan dana yang efektif. Oleh karena itu, pembelanjaan perusahaan yang timbul sehubungan dengan suatu metode atau prosedur yang akurat.

Pengalokasian dan penyusunan financial yang diperoleh dan digunakan perlu direncanakan seluruhnya. Diperlukan penetapan-penetapan financial seperti sumber modal kerja, return yang dikehendaki atau tingkat perputaran yang diinginkan. Dalam hal tersebut dibutuhkan perencanaan dari biaya-biaya yang digunakan efisien mungkin sesuai dengan target dan kebutuhan. Biaya-biaya yang dialokasikan pada masing-masing departemen harus ditentukan dengan jelas perencanaan tersebut dituangkan dalam anggaran realisasi keuangan perusahaan.

Adanya penyusunan pembuatan anggaran financial sebagai factor yang paling penting dan dominan terhadap perencanaan yang disusun oleh manajer, maka kemungkinan pengklasifikasian dan pengelempokan pos-pos keuangan menurut bagiannya yang menyangkut dan termasuk ke dalam kartu, pendapatan atau biaya akan menunjang terlaksananya system pemberian informasi masing-masing manajer yang bila dihubungkan dengan anggaran menurut pusat pertanggung jawaban. Maka hal ini akan membantu pelaksanaan fungsi perencanaan atas dana yang dialokasikan pada setiap departemen secara efektif.

Berdasarkan latar belakang inilah maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul yaitu : **"Analisis Kinerja keuangan untuk perencanaan keuangan pada PT. Askes (Persero) Cabang Makassar"**

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah penelitian adalah **"Apakah Kinerja Keuangan Perusahaan menunjukkan kategori sehat sesuai SK**

Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 juni 1989 Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Badan Usaha milik Negara”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan agar dapat membuat perencanaan yang lebih tepat.
2. Untuk memberikan jenis-jenis indicator yang memberikan nilai-nilai optimal dalam penerapan kinerja untuk memberikan interpretasi atas hasil kinerja PT.Askes (Persero) Cab. Makassar yang telah dicapai.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan akan menjadi informasi kepada perusahaan PT.Askes (Persero) Cab. Makassar untuk digunakan merumuskan kebijakan keuangan.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dalam hal perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari literatur yang sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, serta artikel-artikel yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penulisan.
2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan atau tempat yang akan dijadikan objek penelitian dengan metode sebagai berikut :
 - a. Observasi : Pada metode ini penulis langsung mengadakan peninjauan Pada PT.Askes (Persero) Cab. Makassar.
 - b. Wawancara : Penulis mengadakan wawancara langsung pada pimpinan Perusahaan dan orang-orang yang terlibat langsung dalam Keuangan.
 - c. Dokumentasi : Untuk mendapatkan data secara kuantitatif maka penulis mengumpulkan dan mempelajari laporan-laporan dan bahan-bahan tertulis supaya pembahasan hasil penelitian lebih baik dan mengarah pada sasaran yang diminta.

2.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari PT. Askes (persero) Cab. Makassar dalam bentuk angka-angka (nilai-nilai).
- b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan misalnya sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan data-data lain yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data primer : data ini diperoleh langsung dari perusahaan yang diteliti.
- b. Data sekunder : data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, serta laporan tertulis lainnya.

2.3 Tempat Penelitian

Sehubungan dengan pelaksanaan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian pada PT. Askes (persero) Cab. Makassar yang berlokasi di Makassar yang merupakan tempat beroperasinya perusahaan.

2.4 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan analisis terhadap kinerja yang dicapai oleh PT. Askes (Persero) Cab. Makassar yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan, namun dibatasi hanya pada keuangan tahun 2005 – tahun 2006.

2.5 Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka digunakan metode analisis berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 juni 1989 tentang "Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Badan Usaha Milik Negara"

Tentang "Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Badan Usaha Milik Negara".

Adapun Indikator-indikator yang diperhitungkan adalah sebagai berikut :

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. Sehat sekali, bila memiliki Rentabilitas di atas 12 %, Likuiditas di atas 150 % dan Solvabilitas di atas 200 %
- b. Sehat, bila memiliki Rentabilitas di atas 8 % s/d 12%, Likuiditas diatas 100 s/d 150% dan Solvabilitas diatas 150% s/d 200%
- c. Kurang sehat, bila memiliki Rentabilitas di atas 5% s/d 8%, Likuiditas diatas 75% s/d 100% dan Solvabilitas diatas 100% s/d 150%
- d. Tidak sehat, bila memiliki Rentabilitas sama dengan atau kurang dari 5%, Likuiditas sama dengan atau kurang dari 75% dan Solvabilitas sama dengan atau kurang dari 100%

Metode Analisis yang digunakan adalah :

1. Rasio Likuiditas :

- a. Rasio Lancar

$$\frac{\text{Jumlah Aktiva Lancar}}{\text{Jumlah Kewajiban Lancar}}$$
- b. Rasio Cepat

$$\frac{(\text{Jumlah Aktiva Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Jumlah Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio Solvabilitas:

a. Rasio Hutang atas Harta $\frac{\text{Jumlah Seluruh Kewajiban}}{\text{Jumlah Seluruh Aktiva}}$

b. Rasio Hutang atas Modal $\frac{\text{Jumlah Seluruh Kewajiban}}{\text{Jumlah Modal / Ekuitas Pemilik}}$

3. Rasio Rentabilitas:

a. Imbalan Modal perusahaan (ROA) $\frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Jumlah Aktiva Perusahaan}}$

b. Imbalan Modal Pemilik (ROE) $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Modal}}$

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA



3.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan. Maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Seandainya secara luas dana-dana dialokasikan secara tidak tepat, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lambat. Dalam suatu perekonomian, efisiensi alokasi sumber-sumber daya adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini juga penting untuk menjamin bahwa individu-individu dapat mencapai kepuasan tertinggi bagi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka. Jadi, melalui investasi, pembelanjaan, dan pengelolaan aset-aset secara efisien, manajer keuangan memberi sumbangan terhadap pertumbuhan kekayaan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana

dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan.

Manajemen Keuangan menurut Sutrisno (2003;3) Di definisikan sebagai berikut:

“Manajemen keuangan secara sederhana merupakan manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan yang dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”.

Manajemen keuangan menurut James C Van horned an Jonh M Wachowicz (1997;127) didefinisikan sebagai berikut :

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh”.

Fungsi manajemen keuangan tidak bisa dipisahkan dengan fungsi-fungsi perusahaan yang lainnya seperti pemasaran, produksi, maupun sumberdaya manusia. Kegagalan dalam mendapatkan sumber dana akan menghambat proses produksi, menghambat program-program pemasaran yang telah ditetapkan, menghambat dalam penarikan sumberdaya manusia yang ahli, sehingga akhirnya akan mengakibatkan kerugian perusahaan secara keseluruhan.

Manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumberdaya manusia, akuntansi, Maupun lingkungan ekonomi berpengaruh terhadap keputusan keuangan. Oleh karena itu manajer keuangan harus bekerja sama dengan semua manajer-manajer fungsi tersebut. Apalagi dengan perkembangan perekonomian dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup, telah

memberikan tekanan yang besar bagi perusahaan untuk memperkecil kemungkinan negative yang timbul sebagai akibat kelalaian perusahaan. Manajer keuangan harus saling bekerjasama dengan manajer produksi dan pemasaran dalam menterjemahkan kebijakan perusahaan.

Manajemen keuangan menurut Suad Husnan (1997; 3) didefinisikan sebagai berikut :

“Manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana perusahaan memerlukan berbagai kekayaan seperti mesin, gedung, kendaraan bermotor, persediaan bahan baku, dan sebagainya untuk menjalankan operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan untuk operasi tersebut”.

Tujuan manajemen keuangan menurut Agus Sabardi (1995; 4) adalah sebagai berikut :

“Memaksimalkan kekayaan dari para pemilik sekarang atau para pemegang saham perusahaan untuk perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT)”.

3.2 Pengertian Kinerja

Secara umum kinerja atau performance adalah prestasi yang dihasilkan dari suatu proses atau cara bertindak dari satu fungsi atau lebih.

Dalam konteks perusahaan kinerja atau performance adalah cara beroperasi suatu perusahaan artinya bagaimana pelaksanaan operasinya dalam mencapai tujuan perusahaan. Cara beroperasi ini akan menyangkut berbagai segi manajemennya seperti produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan lain-lain.

Untuk menilai suatu kinerja perusahaan dibutuhkan suatu informasi yang memadai dan terpercaya untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, informasi merupakan fakta yang mempunyai arti dan berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

Informasi adalah faktor yang mempunyai arti dan berguna untuk mencapai tujuan tertentu, di sini akan dibahas penilaian kinerja berdasarkan informasi yang besumber dari laporan keuangan lainnya yang mendukung penilaian atau analisis. Analisis ini relevan untuk dijadikan penilaian kinerja perusahaan karena informasi yang tersedia sifatnya kualitatif.

Informasi kinerja melalui analisis laporan keuangan dilihat dari sudut pemakai, dimaksudkan sebagai salah satu sasaran dalam pengambilan keputusan. Analisis ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti analisis rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas pada laporan keuangan. Kinerja memiliki banyak aspek. Namun pada ekonomi biasanya hanya memusatkan pada tiga aspek pokok yaitu efisiensi, kemajuan teknologi dan keseimbangan dalam distribusi. Dan secara sederhana, pengertian efisiensi adalah menghasilkan suatu nilai yang maksimum dengan sejumlah input tertentu baik secara kuantitas fisik maupun nilai ekonomis (Harga).

Mengevaluasi kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan dapat merupakan masalah yang sulit untuk itu diperlukan kesungguhan dalam melihat lebih jauh ke dalam laporan keuangan tersebut dan mencoba mengerti perbedaan kecil dalam perlakuan akuntansi dan efeknya terhadap pendapatan yang dilaporkan. Menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan akuntansi bukan hanya merupakan

sebuah proses mekanikal yang dibutuhkan analisis tidak hanya menghitung angka saja tapi juga mengerti dari mana datangnya angka itu.

Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan keuangan perusahaan diperlukan laporan keuangan dasar, dimana laporan keuangan ini terdiri dari neraca perhitungan laba-rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan dasar ini merupakan proses akhir akuntansi dimana setiap transaksi yang dapat diukur nilai uang dicatat dan diolah sedemikian rupa dan laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang.

Menurut Agnes Sawir (2002,2) tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.
- b. laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan padanya.

3.3 Pengertian Perencanaan

Pengertian Perencanaan menurut Glenn A. Welsch, Ronald W. Hiltong, Paul N. Gorden (2000,3) didefinisikan sebagai berikut :

“Perencanaan adalah suatu proses pengembangan tujuan perusahaan dan memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini mencakup : (a) Penentuan tujuan perusahaan, (b) Pengembangan kondisi lingkungan agar tujuan tersebut dapat di capai, (c) Pemilihan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, (d) Penentuan langkah-langkah untuk menterjemahkan rencana menjadi kegiatan yang sebenarnya, (e) melakukan perencanaan kembali untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi”

Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Dalam kegiatan perencanaan sering harus didahului dengan kegiatan melakukan perkiraan tentang apa yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang (bisa bulan depan, triwulan depan, tahun depan dan sebagainya), termasuk didalamnya perkiraan tentang berapa banyak pendanaan ekstern yang harus di cari. Untuk menyusun rencana keuangan dipergunakan serangkaian asumsi, baik yang menyangkut hubungan antar variable-variabel keuangan, maupun keputusan-keputusan keuangan.

Sebelum menyusun rencana keuangan, manajer keuangan perlu memahami bagaimana arus kas dalam perusahaan. Baik manajer keuangan kas-lah yang menjadi perhatian bukan laba (Rugi) menurut pengertian akuntansi. Analisis sumber dan penggunaan dana menjadi penting bagi manajer keuangan.

Perencanaan keuangan jangka panjang umumnya menggunakan model keuangan tertentu. Salah satu model yang sering dipergunakan adalah model persentase penjualan. Meskipun demikian tidak tertutup penggunaan metode ini, seperti penggunaan metode regresi untuk memperkirakan jumlah aktiva-aktiva tertentu dimasa

yang akan datang. Sedangkan untuk perencanaan keuangan jangka pendek, penyusunan anggaran kas menjadi basis untuk memperkirakan neraca dan rugi laba perusahaan di masa yang akan datang. Secara lengkap perusahaan dapat pula menyusun anggaran secara keseluruhan.

Model-model penyusunan rencana perusahaan mendasarkan diri atas siklus akuntansi, sehingga tidak nampak keputusan-keputusan keuangan dalam model tertentu. Karena itulah seharusnya proyeksi keuangan tersebut hanya dilakukan setelah perusahaan melakukan perencanaan strategis. Perencanaan startegis ini akan mempengaruhi posisi persaingan perusahaan dimasa yang akan datang, yang pada akhirnya akan menentukan nilai perusahaan.

3.4 Teknik Penyusunan Perencanaan

Perencanaan adalah salah satu cara terkait untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Hal ini mendorong orang untuk bekerja lebih keras, untuk waktu lama, terlihat secara langsung dalam mencapai tujuan dan memikirkan cara-cara terbaik, untuk melakukan pekerjaan. Akan tetapi yang paling penting, perusahaan-perusahaan yang memiliki perencanaan akan memperoleh keuntungan lebih besar dan tumbuh lebih cepat dari pada yang tidak memiliki rencana. Dalam perencanaan juga memiliki tiga tahap yang potensial yaitu :

- Perusahaan-perusahaan yang sangat terpaku pada rencana mereka, mungkin mengalami keterlambatan dalam beradaptasi terhadap perubahan di lingkungannya.

- Perencanaan didasarkan atas asumsi masa depan dan jika asumsi tersebut salah, mungkin rencana tersebut mengalami kegagalan
- Perencanaan bisa mengalami kegagalan jika pembuat rencana terpisah dari pelaksanaan-pelaksanaan tersebut

Ada lima langkah menurut rencana tersebut antara lain :

- Menyusun tujuan SMART (Specifik, measurable (dapat diukur), athainable (dapat dicapai)
- Mengembangkan komitmen terhadap tujuan dari orang yang berkontribusi pada pencapaian tujuan.
- Mengembangkan rencana-rencana kerja untuk mencapai tujuan
- Menelusuri kemajuan terhadap pencapaian tujuan dengan menyusun baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang dan dengan memberikan pada karyawan umpan balik kinerja secara teratur.
- Menjaga fleksibilitas, menjaga pilihan tetap terbuka melalui perencanaan berdasarkan pengetahuan dan mencari kelanjutan pengembangan melalui perencanaan berdasarkan pengetahuan membantu organisasi menjaga aksibilitas seperti yang direncanakan.

Perencanaan yang tepat mengharuskan tujuan pada organisasi yang terbawah dan tengah mendukung sasaran pada organisasi puncak. Manajemen puncak mengembangkan rencana startegis yang menunjukkan bagaimana perusahaan akan mengalami pelanggan dan memposisikan dirinya melalui persaingannya selama periode tertentu. Perencanaan startegi dimulai dengan menciptakan visi dan misi

organisasi. Ada empat jenis misi organisasi: Target musuh yang umum, modal penugasan dan transformasi internal Manajer menengah menggunakan teknik seperti manajemen berdasarkan tujuan untuk mengembangkan rencana taktis yang mengatur perilaku, usaha, dan prioritas, manajer tingkat bawah mengembangkan rencana operasional yang membimbing aktivitas harian dalam memproduksi atau mengirim produk dan jasa organisasi.

Perusahaan-perusahaan menggunakan rencana dalam maksud tertentu untuk menghadapi perubahan kontigensi dan pembangunan produk. Perluasan tujuan digunakan untuk mendorong karyawan agar menemukan cara-cara baru yang kreatif dalam mengerjakan tugas mereka. Tolak ukur dapat dipakai untuk menentukan perluasan tujuan-tujuan yang menantang dan dapat dicapai. Para manajer dan karyawan tidak perlu dihukum jika gagal dalam mencapai perluasan tujuan tersebut. Skenario perencanaan membantu menejer dalam mengantisipasi dan menyiapkan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis mereka. Tujuan langkah dalam skenario perencanaan adalah 1) mendefinisikan kecendrungan, 2) mendefinisikan pemegang saham utama, 3) mengidentifikasi kecendrungan, 4) mengidentifikasi ketidakpastian yang penting, 5) menciptakan skenario awal, 6) memeriksa ketidakpastian dan kelogisan dan 7) mengembangkan kemungkinan rencana untuk setiap skenario. Kumpulan rencana produk membantu perusahaan-perusahaan untuk mengatur semua produk yang dikembangkan pada satu waktu dan menghindari terlalu banyak pengembangan produk-produk yang bukan prioritas proses-proses pengembangan produk dapat dipercepat dengan perencanaan yang menggunakan tim

fungsional silang, mempromosikan komunikasi internal, menggunakan fase-fase pengembangan yang saling melengkapi dan melakukan pengujian prototipe produk secara teratur.

3.5 Analisis Kinerja Keuangan

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Pekerjaan yang paling mudah dalam analisis keuangan tentu saja menghitung rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Bahkan tersedianya program-program komputer, seperti spreadsheet atau program-program akuntansi, atau program-program yang khusus ditulis untuk tujuan laporan keuangan, perhitungan rasio-rasio keuangan menjadi hal yang mudah dilakukan, dan biasa dilakukan secara rutin. Tantangan analis bukan melakukan perhitungan semacam itu, melainkan melakukan analisis dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan yang muncul.

Analisis semacam ini mengharuskan seorang analis untuk melakukan beberapa hal:

- (1) Menentukan dengan jelas tujuan dari analisis
- (2) Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut
- (3) Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan

Untuk membuat keputusan yang rasional dalam usaha mencapai tujuan perusahaan, manajer keuangan harus memiliki alat-alat analisis tertentu. Jenis analisis bervariasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisis. Pemberi

kredit dagang harus menaruh perhatian terutama kepada likuiditas perusahaan yang dianalisis karena tagihan mereka bersifat jangka pendek. Tagihan pemberi kredit jangka panjang, misalnya pemilik obligasi, bersifat jangka panjang, oleh karena itu ia lebih berminat terhadap kemampuan arus kas untuk melunasi utang jangka panjang. Pemilik obligasi mungkin akan menilai struktur modal perusahaan, sumber dan penggunaan dana, serta profitabilitas perusahaan.

Seorang pemilik saham perusahaan pada prinsipnya lebih berkepentingan dengan keuntungan saat ini dan di masa-masa yang akan datang, dengan stabilitas keuntungan tersebut dan perbandingannya dengan keuntungan perusahaan lain. Ia akan menaruh minat pada kondisi keuangan perusahaan sejauh hal itu dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkembang. Bagi perusahaan sendiri, analisis terhadap keadaan keuangannya akan membantu dalam hal perencanaan perusahaan.

Perencanaan dan pengendalian keuangan melibatkan proyeksi-proyeksi berdasarkan standar perkembangan dari umpan balik dan proses penyesuaian untuk memperbaiki prestasi kerja. Perencanaan keuangan mencakup penjualan, laba, dan aktiva yang didasarkan pada alternative strategi produksi dan pemasaran, untuk kemudian menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan permodalan. Bila ternyata hasil actual tidak sesuai dengan proyeksinya, perencanaan keuangan harus dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan potensial yang mungkin akan memberikan hasil yang memuaskan.

Secara internal manajemen juga menggunakan analisa keuangan untuk tujuan pengendalian internal dan penyediaan informasi yang lebih baik mengenai kondisi dan

kinerja keuangan perusahaan bagi pemasok modal. Dari sudut pandang pengendalian internal manajemen perlu melakukan analisa keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan dan keuangan yang efektif.

Perencanaan keuangan biasanya berupa proforma neraca, laporan laba-rugi dan laporan sumber dan penggunaan dana, serta rencana pengeluaran modal berdasarkan kategori dan divisi atau lini bisnis. Rencana dan anggaran keuangan merupakan alat untuk memandu perusahaan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan dalam melakukan penyusuaian yang segera terhadap perubahan dibidang ekonomi dan perubahan persaingan yang selalu terjadi di dunia usaha.

Dalam membuat rencana untuk masa depan, manajer keuangan harus menilai posisi keuangan perusahaan saat ini dan mengevaluasi kesempatan-kesempatan sehubungan dengan posisi saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa analisa keuangan sangat beragam jenisnya yang dipergunakan berdasarkan kepentingan atau kebutuhan pihak tertentu berdasarkan tujuan analisa dan selalu melibatkan penggunaan berbagai laporan keuangan terutama neraca dan laporan rugi laba.

Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu, sedangkan laporan laba rugi merupakan laporan mengenai pendapatan, biaya-biaya, dan laba perusahaan selama periode tertentu.

Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa kondisi dan kinerja perusahaan. Perhitungan rasio-rasio tersebut dilakukan untuk memperoleh perbandingan yang dapat lebih berguna dibandingkan angka-angka yang berdiri sendiri.

Analisis rasio keuangan, yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba-rugi satu dengan lainnya, dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan investor dan memberikan pandangan kedalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh.

Rasio analisis keuangan meliputi dua jenis perbandingan. Pertama, analisis dapat membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Jika rasio keuangan disajikan dalam bentuk suatu daftar untuk periode beberapa tahun, analisis dapat mempelajari komposisi perubahan-perubahan dan menetapkan apakah telah terdapat suatu perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan prestasi perusahaan selama jangka waktu tersebut. Rasio keuangan juga dapat diperhitungkan berdasarkan laporan keuangan proforma atau proyeksi, dan diperbandingkan dengan rasio sekarang atau masa lalu.

Kedua, perbandingan meliputi perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama (Perbandingan eksternal). Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Hanya dengan cara membandingkan rasio keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis seorang analis dapat memberikan pertimbangan yang realistis. Sejauh mungkin, data akuntansi dari bermacam-macam perusahaan yang berbeda-beda dapat distandarkan. Namun, walaupun dengan angka-angka yang distandarkan, seorang analis harus hati-hati dalam menaksirkan perbandingan itu.

3.6 Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989 Tanggal 28 juni 1989 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Badan Usaha Milik Negara

Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK.00/1989 Tanggal 28 juni 1989 mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMN.

1. Menteri adalah Menteri Keuangan selaku Pemegang saham PERSERO dan selaku Pembina Keuangan PERJAN, PERUM serta Bank-bank milik Negara.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :
 - a. Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara.
 - b. Badan Usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu :
 - 1). BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - 2). BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan BUMN lainnya;
 - 3). BUMN yang merupakan Badan Usaha Patungan dengan Swasta Nasional/Asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51 %.
3. Anak perusahaan BUMN adalah perusahaan dimana BUMN memiliki saham mayoritas minimal 51 %.
4. Penggolongan BUMN adalah sebagai berikut :
 - a. Penggolongan BUMN adalah sebagai berikut :
 - b. Menghasilkan barang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai oleh Negara;
 - c. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tertentu dan atau strategis;
 - d. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat;

- e. Didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah;
 - f. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.
5. Kekayaan Negara pada BUMN adalah Negara yang dipisahkan berdasarkan peraturan Pemerintah;
 6. Efisiensi adalah kemampuan untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input) yang serendah-rendahnya
 7. Produktivitas adalah kemampuan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan masukan (input) tertentu;
 8. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
 9. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
 10. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya.
 11. Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh BUMN dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan BUMN.
 12. Tingkat kesehatan BUMN digolongkan sebagai berikut :
 - a. Sehat sekali
 - b. Sehat
 - c. Kurang sehat
 - d. tidak sehat
 13. Restrukturisasi perusahaan adalah tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham.
 14. Kerja sama Operasi (KSO) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
 15. Kontrak manajemen adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak lainnya.
 16. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru dengan melikuidasi perusahaan lama.



17. Penggabungan (merger) adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan, dimana salah satu perusahaan tetap dipertahankan sedangkan perusahaan lainnya dilikuidasi.
18. Pemecahan perusahaan adalah tindakan memecah/membagi satu perusahaan menjadi dua perusahaan atau lebih sehingga masing-masing perusahaan menjadi badan hukum baru.
19. Penjualan saham adalah pengalihan kepemilikan saham kepada pihak lain.
20. Memasyarakatkan saham (go-public) adalah menjual saham melalui pasar modal.
21. Penyertaan langsung (direct placement) adalah penjualan saham yang tidak melalui pasar modal.
22. Perusahaan patungan adalah perusahaan yang dibentuk oleh dua perusahaan atau lebih.
23. Penjualan perusahaan adalah penjualan seluruh kekayaan perusahaan termasuk hutang-hutangnya.
24. Likuiditas adalah pembubaran perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Laporan manajemen adalah laporan berkala Direksi mengenai pelaksanaan hasil kegiatan perusahaan yang mencakup baik segi teknis operasional, investasi maupun keuangan perusahaan termasuk anak-anak perusahaan, yayasan dan koperasi.
26. laporan keuangan adalah laporan Direksi yang mencakup kebijaksanaan keuangan perusahaan, neraca, perhitungan laba rugi, sumber dan penggunaan dana, penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas) dan perubahan modal.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah PT. Askes (Persero)

Pada mulanya asuransi kesehatan Indonesia berada dalam lingkungan Departemen Kesehatan yakni Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang kemudian berubah statusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Berdasarkan nomor 22 tahun 1984 dan nomor 23 Tahun 1984 yang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama Perusahaan Umum Husada Bhakti. Sebelum Perusahaan Umum Husada Bhakti dibentuk sebagai satu-satunya Perusahaan Umum milik Negara yang menangani masalah kesehatan bagi Pegawai Negeri sipil dan penerima pensiunan adalah bermula dari PP Nomor 23 Tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan janda/Duda Pegawai, PP No.3 Tahun 1983 tentang cara pembinaan dan pengawas perusahaan Jawata n, Perum, dan Persero dan PP No. 23 Tahun 1984 Tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukanlah penyempurnaan PP No. 23 tahun 1984 dan diganti dengan PP No. 69. Tahun 1991. Dalam PP No.69 ini terdapat perluasan kepesertaan yang bersifat wajib yaitu veteran

dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya yang masa sebelumnya tidak tercakup secara formal, disamping terbukanya perluasan kepesertaan bagi badan usaha berdasarkan pertimbangan manfaat yang diperoleh dan bersifat sukarela.

Untuk menyelenggarakan program tersebut maka berdasarkan PP No. 69 Tahun 1992, terjadi perubahan status dari Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi perusahaan Persero yaitu PT. Asuransi Kesehatan Kesehatan Indonesia (Persero) yang kini berlaku diseluruh wilayah Indonesia, baik daerah TK. I maupun Daerah TK. II termasuk kota Makassar yang diberi nama PT. Askes (Persero) Indonesia Cabang Makassar.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan tentang peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum bagi PT. Askes (Persero) Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES :

- a. UU No. 8/1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian.
- b. UU No.2/1992 Tentng Perasuransian
- c. UU no.23/1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri sipil (PNS), penerima pension, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.
- d. PP No. 6/1992 tentang Pengalihan bentuk Perum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Peraeroan (Persero).
- e. Keppres No. 8/1997 tentang perubahan dan tambahan atas Keppres No. 56/1997 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan, penyeteroran dan besarnya iuran wajib Pegawai Negeri Sipil, pejabat Negara dan Pensiunan.
- f. UU. No.23/1992 tentang kesehatan

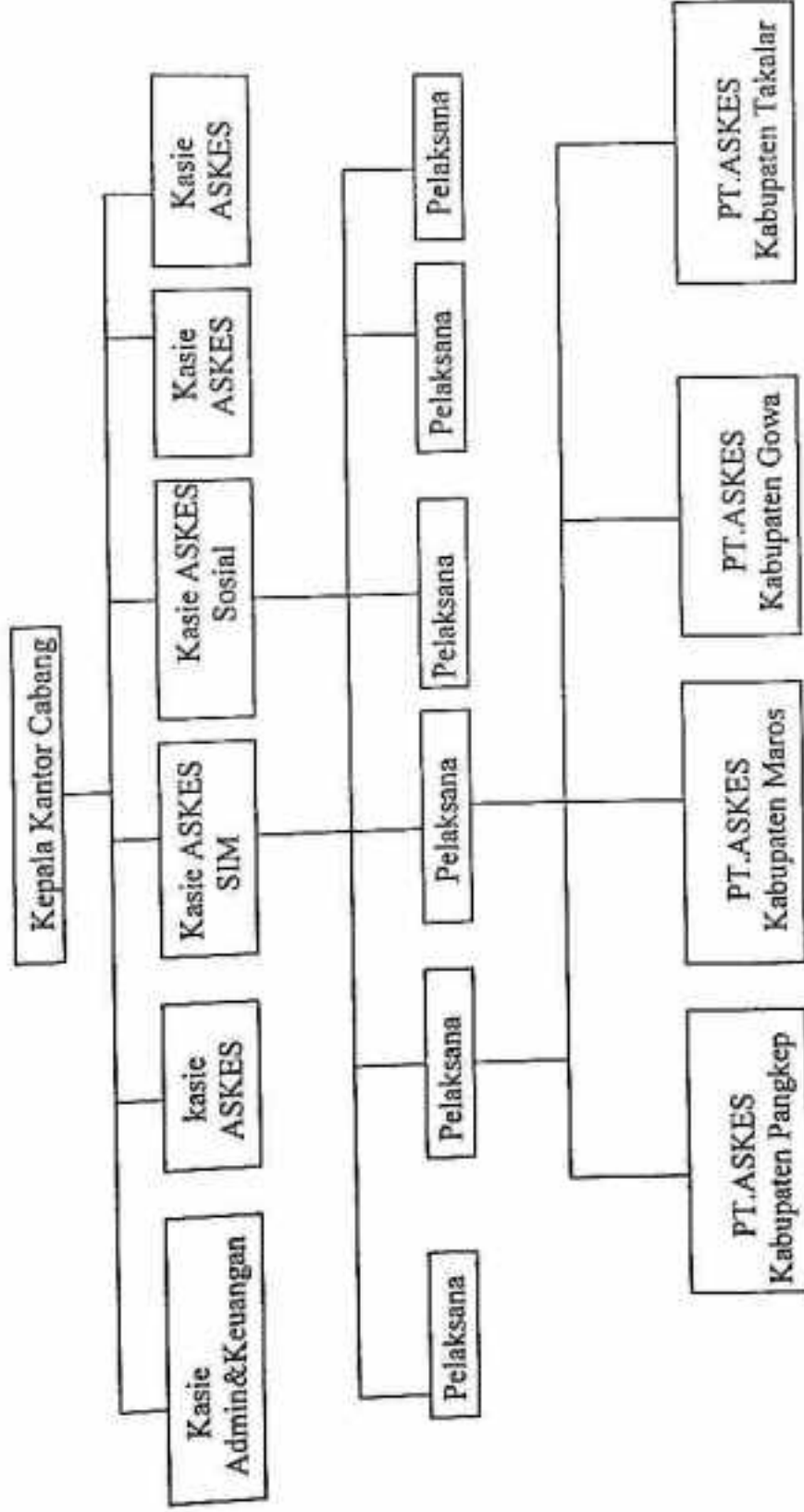
- g. Keputusan menteri kesehatan RI No. 881/Menkes/SK/VIII/1998 tentang tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan di Rumah sakit bagi peserta ASKES dan anggota keluarganya.
- h. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI No. 883/Menkes/SKB/VIII/1998 dan Menteri Dalam Negeri RI No.060.440-915 tentang tarif dan tata laksana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit umum daerah bagi peserta ASKES Indonesia dan anggota keluarganya.
- i. Informasi tentang surat edaran bersama Dirjen Anggaran Keuangan dan Dirjen Otonomi Daerah Depadagri No. SE-7/2004 No. 440/128/OTDA tentang pedoman dan tata cara pembayaran iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggara Askes.

4.2 Struktur Organisasi

Semua organisasi mempunyai sejumlah fungsi yang harus dilaksanakan. Fungsi-fungsi dasar biasanya disusun dalam suatu organisasi lini, di mana alurnya jelas dan mengalir kebawah melalui tingkatan-tingkatan managerial PT. ASKES (Persero) Cabang Makassar dilihat dari bentuk struktur organisasi yang dimilikinya berbentuk struktur organisasi lini.

STRUKTUR ORGANISASI

PT. ASKES (PESRERO) INDONESIA CABANG MAKASSAR



Individu-individu dalam setiap bagian melaksanakan kegiatan-kegiatan utama perusahaan sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Setiap orang mempunyai hubungan sedangkan pelaporannya hanya dengan satu atasan, sehingga ada kesatuan ada kesatuan perintah.

Adapun Fungsi dan Tugas staf Dalam Perusahaan yaitu

1. Kepala kantor Cabang Makassar bertugas :

- a. Bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi lingkungan masing-masing.
- b. Bertanggung jawab atas fasilitas yang berada dilingkungan unit yang bersangkutan.
- c. Bertanggung jawab atas pembinaan disiplin pegawai
- d. Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap semester atau tahun.

2. Kepala Seksi Pelanggan

- a. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas seksi pelanggan.
- b. Melayani permintaan informasi awal pada kantor cabang Makassar.
- c. Membuat laporan pendistribuan cetakan informasi yang berkaitan dengan kepesertaan sosial.
- d. Membuat laporan penanganan keluhan dan data keluhan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- e. Membuat laporan kegiatan pembinaan/penyuluhan peserta yang berkaitan dengan kepesertaan sosial.
- f. Memverifikasi daftar kegiatan isian peserta sosial

3. Kepala Seksi Administrasi dan keuangan

- a. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas seksi administrasi dan pelanggan.
- b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran alat-alat keuangan.
- c. Melaksanakan sistem akuntansi perusahaan.
- d. Melakukan infestasi finansial.
- e. Menyelenggarakan pengendalian anggaran.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Menyiapkan arsip pertanggung jawaban keuangan dan arsip lainnya.
- h. Melakukan pembinaan teknik ketatausahaan dan hubungan masyarakat.
- i. Menyelenggarakan ketatausahaan, tata naskah, dokumentasi rumah tangga, serta urusan umum lainnya.
- j. Mengatur dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana.
- k. Melaksanakan tugas lain dari perkalian cabang.

4. Kepala Seksi Pelayanan Askes Sosial (khusus menangani peserta Askes sosial/Peserta Wajib)

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan kesehatan .
- b. Melaksanakan program pemeliharaan kesehatan.
- c. Menentukan nilai ganti atas tagihan dari PPK

- d. Melaksanakan verifikasi klaim.
 - e. Melaksanakan penyuluhan terhadap PPK dalam bidang pelayanan kesehatan
 - f. Melakukan evaluasi pemakai obat di PKK.
 - g. Menyelenggarakan administrasi pelayanan kesehatan.
 - h. Memanfaatkan pelaksanaan pengendalian PPK.
 - i. Menyiapkan jaringan pelayanan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kepala seksi Pelayanan Askes Komersial (khusus menangani peserta sukarela/swasta)
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan kesehatan.
 - b. Melaksanakan program pemeliharaan kesehatan
 - c. Menentukan ganti atas tagihan dari PKK.
 - d. Melaksanakan verifikasi klaim.
 - e. Melaksanakan penyuluhan terhadap PPK dalam bidang pelayanan kesehatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. kepala seksi Pelayanan ASKES Gakin (Keluarga Miskin)
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan kesehatan.
 - b. Melaksanakan program pemeliharaan kesehatan.

- c. Menentukan nilai ganti atas tagihan dari PPK.
 - d. Melaksanakan verifikasi klaim.
 - e. Melaksanakan penyuluhan terhadap PPK dalam bidang pelayanan kesehatan.
 - f. Melakukan evaluasi pemakaian obat di PPK.
 - g. Menyelenggarakan administrasi pelayanan kesehatan.
 - h. Memanfaatkan pelaksanaan pengendalian PPK.
 - i. Menyiapkan jaringan pelayanan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen (SIM) bertugas mengontrol, mengawasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen perusahaan dan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perangkat elektronik yang digunakan seperti komputer.

4.3 Kegiatan Usaha

Dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada pesertanya PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, Palang Merah Indonesia (PMI), Apotik dan Optik.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan PT. ASKES (Persero) Indonesia kepada pesertanya yaitu :

Pelayanan kesehatan pada peserta terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi :

- 1) Pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama.
 - 2) Rawat Inap Tingkat Pertama.
- b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang meliputi :
- 1) Rawat Jalan Tingkat Pertama
 - 2) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.
 - 3) Rawat Inap di Ruang Perawatan Khusus.
- c. Pelayanan Gawat Darurat.
- d. Pelayanan Persalinan.
- e. Pelayanan Transfusi Darah.
- f. Pelayanan Obat.
- 1) Obat yang diberikan mengacu kepada DPHO dan daftar Obat Tambahan PT. Askes (Persero) yang berlaku.
 - 2) Pada pelayanan RJTP, obat yang diperoleh langsung dari Dokter keluarga atau diresepkan oleh dokter keluarga dan diambil di apotek yang ditunjuk.
 - 3) Pada pelayanan RJTL dan RI, obat diambil di apotek atau Instansi Farmasi di Rumah sakit.
 - 4) Obat khusus, adalah obat yang sebelum di ambil diapotek harus melampirkan persyaratan tertentu dan dilegalisasi oleh PT. Askes (Persero), meliputi :
 - a. Obat khusus yang terdapat di dalam DPHO PT. Askes (Persero).
 - 1) Antibiotik tertentu
 - 2) Obat anti kanker
 - 3) Cairan nutrisi tertentu.

b. Antibiotik di luar DPHO PT. Askes (Persero)

5) Menunjukkan kartu Askes

g. Pelayanan canggih dalam rangka pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, gawat darurat, persalinan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

h. Pelayanan Kacamata.

4.4 Keadaan Personalia

Jumlah karyawan pada PT. ASKES (Persero) Cabang Makassar sebanyak 35 orang, yang terdiri atas 20 orang tenaga tetap dan 15 orang tenaga tidak tetap dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Kepala Cabang.
- b. 1 (satu) orang pejabat diperbantukan
- c. 6 (enam) orang kepala seksi.
- d. 25 (dua puluh lima) orang staf pelaksana
- e. 4 (empat) orang tenaga yang diperbantukan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Laporan Keuangan PT. Askes (Persero)

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran keuangan atau laporan keuangan atau kemunduran perusahaan. Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi yang dicatat menurut prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang merupakan laporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan dengan maksud untuk mengendalikan informasi keuangan mengenai perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan.

Adapun hasil perhitungan dari laporan keuangan tersebut akan menjelaskan apakah kondisi keuangan pada PT. Askes (Persero) cabang makassar akan mengalami perkembangan atau tidak atau masuk dalam kategori sehat menurut standar undang-undangan kinerja BUMN atau tidak. Untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Askes (Persero) diperlukan laporan keuangan sebagai alat analisis. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan neraca dan laba rugi komparatif untuk 2 tahun terakhir yaitu tahun 2005 dan 2006. untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disajikan mengenai laporan keuangan tersebut

Tabel I

PT. ASKES (PERSERO) CABANG MAKASSAR
NERACA KOMPARATIF
PER 31-12-2006 dan 31-12-2005

KETERANGAN	31-Des-06	31-Des-05
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas	Rp 2.353.783	Rp 1.610.432
Bank	Rp 459.168.418	Rp 574.553.268
Piutang lain-lain	Rp 110.000	
Uang muka kerja	Rp 2.000.000	
Uang muka pelayanan kesehatan	Rp 2.007.559.096	Rp 1.939.233.841
Persediaan peralatan medis		Rp 2.319.669
Persediaan perlengkapan medis	Rp 1.154.950	
TOTAL AKTIVA LANCAR	Rp 2.472.346.247	Rp 2.517.717.210
NILAI BUKU AKTIVA TETAP		
Harga perolehan tanah kotor	Rp 93.531.550	Rp 83.831.550
Harga perolehan bangunan kantor	Rp 317.490.355	Rp 317.490.355
Harga perolehan alat angkutan	Rp 251.406.700	Rp 79.548.000
Harga perolehan inventaris kantor	Rp 132.714.500	Rp 118.505.750
Harga perolehan komputer	Rp 660.704.538	Rp 579.861.788
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	Rp (663.995.866)	Rp (454.824.160)
TOTAL NILAI BUKU AKTIVA TETAP	Rp 791.851.777	Rp 724.413.283
TOTAL AKTIVA	Rp 3.264.198.024	Rp 3.242.130.493
PASIVA		
PASIVA LANCAR		
Hutang pelayanan kesehatan Rawat jln Ting.Pertama	Rp 2.068.000	
Hutang pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingk.Pertama		
Hutang pelayanan kesehatan Rawat jln Tingk. lanjutan	Rp 300.000	
Hutang pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingk. lanjutan	Rp 41.804.167	Rp 47.514.478
Hutang pajak pasal 21	Rp 44.172.167	Rp 47.514.478
TOTAL PASIVA LANCAR	Rp 1.302.656.013	Rp 1.439.214.872
REKENING PENUTUP	Rp 1.917.369.844	Rp 1.755.401.143
MODAL SENDIRI	Rp 3.264.198.024	Rp 3.242.130.493
TOTAL PASIVA		

Tabel 2

PT.ASKES (PERSERO) CABANG MAKASSAR
 PERHITUNGAN LABA/RUGI KOMPARATIF
 PER 31-12-2006 DAN 31-12-2005

KETERANGAN	2006	2005
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Rekening kas dan bank kantor regional	Rp 23.800.000.000	Rp 27.500.000.000
Pendapatan premi	Rp 1.813.380.088	
Pendapatan premi BUMN & BUMD	Rp 14.186.317	Rp 15.589.556
Pendapatan subsidi pemerintah	Rp 1.130.232.229	
Pendapatan jasa Giro	Rp 54.309.554	Rp 40.871.227
Pendapatan selisih pembayaran	Rp 18.717	Rp 554
Jumlah pendapatan operasional	Rp 26.812.126.905	Rp 27.556.461.337
BIAYA OPERASIONAL		
Beban rawat jalan tingkat pertama	Rp 2.142.171.371	Rp 3.094.112.899
Beban rawat inap tingkat pertama	Rp 126.160.000	Rp 207.391.821
Beban rawat jalan tingkat lanjutan	Rp 8.502.494.790	Rp 9.486.334.833
Beban rawat inap tingkat lanjutan	Rp 12.907.953.524	Rp 12.277.207.916
Beban honorarium Pembina PELKES	Rp 30.610.000	Rp 17.380.000
Beban rapat/sidang Pembina PELKES	Rp 31.601.500	Rp 22.903.950
Beban sosialisasi DPHO	Rp 252.344.410	Rp 220.285.250
beban perjalanan Dinas PELKES	Rp 5.440.000	Rp 214.200.000
Beban peningkatan Pembina PELKES		Rp 119.489.550
Beban gaji pokok pegawai	Rp 419.830.405	Rp 50.768.343
Beban tunjangan pegawai	Rp 419.769.442	Rp 4.523.275
Beban lembur pegawai	Rp 8.344.500	
Beban kompensasi kendaraan dinas	Rp 21.690.000	Rp 32.275.357
Beban gratifikasi pegawai	Rp 154.539.349	Rp 24.160.379
Beban Tunjangan pendidikan pegawai	Rp 63.214.145	
beban pengolahan data	Rp 830.000	Rp 2.467.457
Beban barang cetakan	Rp 1.450.000	Rp 23.334.065
Beban alat tulis kantor	Rp 18.729.505	Rp 421.720
Beban pengiriman dokumen	Rp 568.947	Rp 1.535.968
Beban fotokopi	Rp 1.766.425	Rp 5.189.000
Beban administrasi bank	Rp 7.160.000	Rp 3.938.263
Beban pemeliharaan bangunan gedung	Rp 7.356.606	
Beban pemeliharaan peralatan alat angkutan	Rp 41.225.295	Rp 12.198.326
Beban pemeliharaan peralatan bangunan gedung	Rp 3.259.484	Rp 1.241.687
Beban pemeliharaan inventaris kantor	Rp 11.851.237	Rp 2.026.874
Beban pemeliharaan komputer		Rp 6.221.887
Beban pemakaian air	Rp 2.189.374	Rp 1.333.262
Beban pemakaian listrik	Rp 23.753.688	Rp 24.385.281

KETERANGAN	2006	2005
Beban pemakaian telekomunikasi	Rp 25.354.296	Rp 16.665.444
Beban surat kabar dan majalah	Rp 446.300	Rp 295.000
Beban PBB	Rp 558.900	Rp 183.363
Beban sumbangan dan uang muka	Rp 2.025.000	Rp 212.500
Beban perjalanan dinas	Rp 8.065.000	Rp 2.943.500
Beban pindah pegawai	Rp 16.762.300	Rp 1.598.750
Beban penyuluhan media cetak	Rp 2.650.000	Rp 230.000
Beban penyuluhan hub. Masyarakat		Rp 5.576.500
Beban rapat/sidang penyuluhan		Rp 13.104.950
Beban penyusutan gedung	Rp 14.232.064	Rp 11.973.504
Beban penyusutan alat angkutan	Rp 21.061.137	Rp 2.983.929
Beban penyusutan peralatan gedung		Rp 13.594.889
Beban penyusutan peralatan kantor	Rp 167.402.201	Rp 74.207.432
Beban administrasi KEPSER	Rp 200.000	
Beban perjalanan dinas Pend & latihan	Rp 3.300.000	
Beban Administrasi Manag mutu	Rp 441.825	
Beban Rapat Manag mutu	Rp 380.000	
Beban selisih pembayaran	Rp 11.800	
Jumlah beban operasional	Rp 25.469.198.826	Rp 26.001.164.759
laba (rugi) operasional	Rp 1.280.890.303	Rp 1.418.804.550
Pendapatan dan beban lain-lain	Rp 21.765.710	Rp 20.410.322
Pendapatan lain-lain	Rp 21.765.710	Rp 20.410.322
Jml Pendapatan lain-lain		
Laba (Rugi) bersih	Rp 1.302.656.013	Rp 1.439.214.872

5.2 Kriteria Penilaian Kinerja pada PT. Askes (Persero) Cabang Makassar.

Kriteria penilaian tingkat kesehatan keuangan pada PT. Askes (Persero) cabang Makassar berdasarkan Surat keputusan menteri Keuangan RI No. 826/KMK.031.1992 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Januari 1989. Adapun tata cara penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio financial sebagai ukuran tingkat kesehatan perusahaan Badan Usaha milik Negara (BUMN) bahwa PT. Askes (Persero) Cabang Makassar tergolong badan usaha milik Negara yang berstatus persero.

Kriteria penilaian kinerja keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang perubahan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK.00/1989 Tanggal 28 Juni 1989 sebagai berikut:

- e. Sehat sekali, bila memiliki Rentabilitas di atas 12 %, Likuiditas di atas 150 % dan Solvabilitas di atas 200 %
- f. Sehat, bila memiliki Rentabilitas di atas 8 % s/d 12%, Likuiditas diatas 100 s/d 150% dan Solvabilitas diatas 150% s/d 200%
- g. Kurang sehat, bila memiliki Rentabilitas di atas 5% s/d 8%, Likuiditas diatas 75% s/d 100% dan Solvabilitas diatas 100% s/d 150%
- h. Tidak sehat, bila memiliki Rentabilitas sama dengan atau kurang dari 5%, Likuiditas sama dengan atau kurang dari 75% dan Solvabilitas sama dengan atau kurang dari 100%

5.3 Rasio Finansial

Rasio financial menggambarkan suatu hubungan dari dua unsure atau lebih secara matematis, sehingga dapat memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya sesuatu perusahaan terutama apabila dibandingkan dengan angka standar kesehatan BUMN. Dengan menganalisa rasio, maka dapat ditentukan tingkat atau prestasi yang dicapai oleh PT. Askes (Persero) selama 2 tahun terakhir dengan menggunakan analisis terhadap neraca dan perhitungan laba rugi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilakukan analisis kinerja keuangan pada PT. Askes (Persero) dengan menentukan posisi keuangan beserta prestasi yang dicapai oleh perusahaan tersebut selama tahun 2005 s/d tahun 2006.

Adapun analisis dari penjelasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Rasio Likuiditas tidak dapat dihitung karena data tidak lengkap.
2. Rasio Solvabilitas :

Rasio Solvabilitas adalah Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

- a. Rasio Hutang atas harta adalah Rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki dengan rumus sbb:

$$\text{Rasio Hutang atas harta} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aktiva}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, rasio utang atas harta tahun 2005 dan 2006 adalah

$$\text{Rasio Hutang atas harta 2005} = \frac{47.514.478}{3.242.130.493}$$

$$= 0,014 \text{ atau } 1,46 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Hutang atas harta 2006} &= \frac{44.172.167}{3.264.198.024} \\ &= 0,013 \text{ atau } 1,351 \% \end{aligned}$$

- b. Rasio Hutang atas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah seluruh hutang (baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek) dengan modal sendiri perusahaan.

$$\text{Rasio Hutang atas modal sendiri} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total modal sendiri}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, rasio hutang atas modal sendiri tahun 2005 dan 2006 adalah

$$\begin{aligned} \text{Rasio Hutang atas Modal sendiri 2005} &= \frac{47.514.478}{1.755.401.143} \\ &= 0,027 \text{ atau } 2,706 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Hutang atas Modal sendiri} &= \frac{44.172.167}{1.917.369.844} \\ &= 0,023 \text{ atau } 2,303 \% \end{aligned}$$

3. Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas). Rasio ini keuntungan atau kemampulabaan merupakan hasil akhir masih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen rasio keuntungan akan memberikan jawaban terakhir tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio

ini memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan dengan analisis sbb;

a. Rasio pengembalian atas ekuiditas (ROE)

Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik atau pemegang saham perusahaan dengan rumus sbb;

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Modal sendiri}}$$

Berdasarkan rumus tersebut diatas, ROE untuk tahun 2005 dan 2006 dapat ditentukan yaitu sbb :

$$\begin{aligned} \text{ROE 2005} &= \frac{1.439.214.872}{1.755.401.143} \\ &0,819 \text{ atau } 81,98 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ROE 2006} &= \frac{1.302.656.013}{1.917.369.844} \\ &0,679 \text{ atau } 67,93 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa untuk setiap rupiah modal sendiri akan menghasilkan keuntungan untuk tahun 2005 sebesar Rp. 0,82 dan untuk tahun 2006 sebesar Rp. 0,78.

b. Imbalan investasi (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan dengan rumus sbb :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}}$$

Berdasarkan rumus diatas, ROA untuk tahun 2005 dan 2006 dapat ditentukan yaitu sbb :

$$\begin{aligned} \text{ROA 2005} &= \frac{1.439.214.872}{3.242.130.493} \\ &= 0,443 \text{ atau } 44,39 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ROA 2006} &= \frac{1.302.656.013}{3.264.198.024} \\ &= 0,399 \text{ atau } 39,9 \% \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat hasil perhitungan rasio-rasio tersebut dari tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3. Hasil perhitungan rasio-rasio financial pada PT.Askes (Persero) cabang Makassar tahun 2005 dan 2006.

No	Rasio finansial	Tahun	
		2005	2006
		Nilai rasio	Nilai rasio
1	Rasio Solvabilitas		
	Rasio Hutang atas Harta	1,46 %	1,35 %
	Rasio Hutang atas Modal Sendiri	2,71%	2,30%
3	Rasio Rentabilitas		
	ROE	81,98%	67,93%
	ROA	44,39%	39,90%
	Total skor penilaian kinerja	130,54	111,48

Sumber : Hasil olahan data

Kinerja Keuangan Berdasarkan Tingkat Rasio

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa untuk tahun 2005 dan 2006 tingkat Solvabilitas sangat rendah dan tingkat Rentabilitas Perusahaan sangat tinggi. Rasio solvabilitas yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek pada tahun 2005 – 2006 ini, justru mengalami penurunan, dapat dilihat pada table 2, bahwa tahun 2005-2006 rasio hutang atas Harta = $1,46 - 1,35 = 0,11$ atau 11 %, Pada Rasio Hutang atas modal sendiri juga mengalami penurunan $2,7 - 2,3 = 0,4$ atau 40 %. Pada tahun 2005 dan 2006 Rasio

Solvabilitas tergolong tidak sehat dikarenakan masuk ke dalam klasifikasi dengan nilai Solvabilitas berada pada posisi $\leq 100\%$

Rasio keuntungan ini atau Rasio Rentabilitas ini merupakan hasil akhir dari efektivitas manajemen perusahaan dalam pengelolaan perusahaan untuk imbalan menghasilkan laba. Untuk imbalan kepada pemegang saham (ROE) ini mengalami penurunan pada tahun 2006 jika dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar $81,9 - 67,9 = 14\%$, dan untuk imbalan investasi ROI atau sering disebut ROA mengalami penurunan yaitu dari $44,39 - 39,9 = 4,49$ atau 449% . Pada Tahun 2005 dan 2006 Rasio Rentabilitas tergolong sehat sekali dikarenakan masuk ke dalam klasifikasi dengan nilai Rentabilitas berada pada posisi di atas 12%

Dari penjelasan diatas penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan dapat memberikan pandangan mendalam tentang perubahan kondisi kinerja keuangan PT.Askes (Persero) cabang makassar untuk 2005-2006 dimana kondisi kinerja perusahaan untuk mengalami Penurunan dari tahun 2005-2006.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan penilaian kinerja menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No 826/KMK.013.1992. Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK.00/1989 Tanggal 28 juni 1989, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada tahun 2006 kinerja keuangan PT,Askes (Persero) Cabang Makassar untuk Rasio Solvabilitas tergolong Tidak Sehat yang mana nilai kinerja keuangannya sebesar 3,65 % ini dikarenakan masuk ke dalam klasifikasi dengan nilai kinerja keuangannya berada pada posisi $\leq 110\%$. Dan untuk Rasio Rentabilitas tergolong Sangat Sehat yang mana nilai kinerja keuangannya sebesar 107,8% ini dikarenakan masuk ke dalam klasifikasi dengan kinerja berada pada posisi diatas 12%
2. Pada tahun 2005 kinerja keuangan PT.Askes (Persero) Cabang Makassar untuk Rasio Solvabilitas tergolong Tidak Sehat yang mana kinerja keuangannya sebesar 4,17% ini dikarenakan masuk ke dalam klasifikasi dengan nilai kinerja berada pada posisi $\leq 100\%$. Dan pada Rasio Rentabilitas tergolong Sangat Sehat yang mana nilai kinerja keuangannya sebesar 126,3% ini dikarenakan masuk ke dalam klasifikasi dengan kinerja berada pada posisi diatas 12%.

3. Kinerja keuangan PT.Askes (Persero) Cabang Makassar dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan kinerja keuangan dihitung berdasarkan Rasio Solvabilitas dan Rasio Rentabilitas dari tahun 2005-2006 sebesar 19,06

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kinerja keuangan perusahaan PT. Askes (persero) cabang makassar berada dalam kondisi sehat sehingga hipotesis di tolak

6.2 Saran

Dengan melihat pada hasil analisis kinerja tersebut kita dapat melihat bahwa pada tahun 2005 – 2006 terjadi kenaikan skor sebesar 281,79 %. Untuk itu penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi perkembangan kinerja perusahaan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para manajemen perusahaan mempertahankan dan memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan menekan biaya-biaya operasional serta berusaha memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam perusahaan secara efektif dan efisien.
2. Sebaiknya para manajemen perusahaan melihat ke masa lalu, mempelajari dan menjadikan landasan berfikir serta dijadikan sebagai suatu pengalaman untuk dapat menetapkan perencanaan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi M. Mamduh, Halim Abdul, 2005, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke Dua, Penerbit dan Percetakan AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Helfert A. Erich, 1982, *Teknik Analisa Keuangan*, Edisi Ke Lima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Husnan Suad, 1997, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*, Edisi Ke Empat, Penerbit BPFE, Yogyakarta,.
- Husnan Suad, 1998, *Manajemen Keuangan*, Edisi Ke Empat, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Rahardjo Budi, 2003, *Laporan Keuangan Perusahaan*, Edisi Pertama, Penerbit Gajamada University Press, Yogyakarta.
- Sawir Agnes, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan dan perencanaan Keuangan Perusahaan*, Edisi Ke Tiga, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sinuraya Murthada, 1999, *Teori Manajemen Keuangan*, Edisi Ke Empat, Penerbit Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno, 2003, *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*, Jakarta.
- Tampubolon P. Manahan, 2005, *Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama, Penerbit Galia Indonesia, Bogor.
- Van Horne, James C. Wachowicz, John M., 1997, *Prinsip-prinsip manajemen keuangan*, Edisi Ke Sembilan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Welsch A. Glenn, Hiltong W. Ronald, Gordon N. Paul, 2005, *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 740/KMK.00/1989 TANGGAL 28 JANUARI 1989
TENTANG
PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan dictum ketua instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988, pelaksanaan penyehatan dan penyempurnaan pengelolaan badan Usaha Milik Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut dalam butir a, efisiensi dan produktifitas Badan Usaha Milik Negara perlu ditingkatkan.
c. Bahwa sehubungan dengan ini dipandang perlu menetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat : 1. Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Nomor 2870);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2871);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang bank Bumi Daya (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2872);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2873);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2874);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2875);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 2904);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUm) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO); (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246);
13. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988.
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS BADAN
USAHA MILIK NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

1. Menteri adalah Menteri Keuangan selaku Pemegang saham PERSERO dan selaku Pembina Keuangan PERJAN, PERUM serta Bank-bank milik Negara.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :
 - a. Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki Negara.
 - b. Badan Usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki Negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu :
 - 1). BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - 2). BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan BUMN lainnya;
 - 3). BUMN yang merupakan Badan Usaha Patungan dengan Swasta Nasional/Asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51 %.
3. Anak perusahaan BUMN adalah perusahaan dimana BUMN memiliki saham mayoritas minimal 51 %.
4. Penggolongan BUMN adalah sebagai berikut :
 - a. Penggolongan BUMN adalah sebagai berikut :
 - b. menghasilkan barang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai oleh Negara;
 - c. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tertentu dan atau strategis;
 - d. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat;

- e. Didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah;
 - f. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.
5. kekayaan Negara pada BUMN adalah Negara yang dipisahkan berdasarkan peraturan Pemerintah;
 6. Efisiensi adalah kemampuan untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input) yang serendah-rendahnya
 7. Produktivitas adalah kemampuan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan masukan (input) tertentu;
 8. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
 9. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
 10. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya.
 11. Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh BUMN dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan BUMN.
 12. Tingkat kesehatan BUMN digolongkan sebagai berikut :
 - a. Sehat sekali
 - b. Sehat
 - c. Kurang sehat
 - d. tidak sehat
 13. Restrukturisasi perusahaan adalah tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham.
 14. Kerja sama Operasi (KSO) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
 15. Kontrak manajemen adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak lainnya.
 16. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru dengan melikuidasi perusahaan lama.

17. Penggabungan (merger) adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan, dimana salah satu perusahaan tetap dipertahankan sedangkan perusahaan lainnya dilikuidasi.
18. Pemecahan perusahaan adalah tindakan memecah/membagi satu perusahaan menjadi dua perusahaan atau lebih sehingga masing-masing perusahaan menjadi badan hukum baru.
19. Penjualan saham adalah pengalihan kepemilikan saham kepada pihak lain.
20. Memasyarakatkan saham (go-public) adalah menjual saham melalui pasar modal.
21. Penyertaan langsung (direct placement) adalah penjualan saham yang tidak melalui pasar modal.
22. Perusahaan patungan adalah perusahaan yang dibentuk oleh dua perusahaan atau lebih.
23. Penjualan perusahaan adalah penjualan seluruh kekayaan perusahaan termasuk hutang-hutangnya.
24. Likuiditas adalah pembubaran perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Laporan manajemen adalah laporan berkala Direksi mengenai pelaksanaan hasil kegiatan perusahaan yang mencakup baik segi teknis operasional, investasi maupun keuangan perusahaan termasuk anak-anak perusahaan, yayasan dan kopersai.
26. laporan keuangan adalah laporan Direksi yang mencakup kebijaksanaan keuangan perusahaan, neraca, perhitungan laba rugi, sumber dan penggunaan dana, penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas) dan perubahan modal.

BAB II
PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS
BADAN USAHA MILIK NEGARA
PASAL 2

- (1). Peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN dilakukan melalui restrukturisasi perusahaan.
- (2). Restrukturisasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Perubahan status hukum BUMN ke arah yang lebih menunjang pencapaian maksud dan tujuan perusahaan;
 - b. Kerja sama Operasi atau kontrak Manajemen dengan pihak ketiga;
 - c. Konsolidasi atau Merger;
 - d. pemecahan badan usaha;
 - e. penjualan saham melalui pasar modal;
 - f. penjualan saham secara langsung (direct placement)
 - g. Pembentukan Perusahaan Patungan.

BAB III
PENILAIAN KINERJA
Pasal 3

- (1). Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan, dilakukan melalui penilaian kinerja BUMN secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (2). Hasil penilaian kinerja BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk menentukan penggolongan tingkat kesehatan BUMN.

Pasal 4

Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. Sehat sekali, yaitu BUMN yang nilai bobot keuangannya dalam 3(tiga) tahun terakhir menunjukkan rata-rata diatas 100;
- b. Sehat, yaitu BUMN yang nilai bobot kondisi keuangannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka rata-rata diatas 68 s/d 100;

- c. Kurang sehat, yaitu BUMN yang dinilai bobot kondisi keuangannya dalam 3 (Tiga) tahun menunjukkan angka rata-rata diatas 44 s/d 68;
- d. Tidak sehat yaitu BUMN yang nilai bobot kondisi keuangannya dalam 3 (Tiga) tahun terakhir menunjukkan menunjukkan angka rata-rata kurang dari atau sama dengan 44.

Pasal 5

- (1). Penilaian tingkat kesehatan BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sehat sekali bila dalam 3 (tiga) tahun terakhir, memiliki Rentabilitas di atas 125 Likuiditas di atas 150 % dan solvabilitas di atas 200 %
 - b. Sehat bila dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki rentabilitas diatas 8 % s/d 12 % likuiditas diatas 100 s/d 150% dan solvabilitas di atas 8% s/d 12% likuiditas diatas 100 % s/d 150% dan solvabilitas diatas 150 % s.d 200%.
 - c. Kurang sehat bila dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki rentabilitas di atas 5% s/d 8% Likuiditas diatas 75 % s/d 100 % dan solvabilitas di atas 100% s/d 150%.
 - d. Tidak sehat bila dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki Rentabilitas sama dengan atau kurang dari 5%, Likuiditas sama dengan atau kurang dari 75% dan Solvabilitas sama dengan atau kurang dari 100%
- (2). Rentabilitas dihitung dari hasil Laba-Rugi sebelum pajak dibagi dengan modal yang digunakan.
- (3). Modal yang digunakan (capital employed) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Aktiva tetap Netto ditambah dengan aktiva lancar dikurangi penyertaan.
- (4). Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- (5). Khusus untuk Bank, Asuransi dan lembaga Keuangan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Perubahan Status Hukum

Pasal 6

Perubahan status hukum BUMN dapat dilakukan bila berdasarkan penilaian, perubahan status hukum tersebut dapat mempercepat peningkatan efisiensi perusahaan dan perbaikan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

Perubahan status hukum BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kerja Sama Operasi atau kontrak manajemen

Pasal 8

Kerja Sama Operasi atau kontrak manajemen dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar, kemampuan teknologi/operasi dan efisiensi perusahaan.

Pasal 9

- (1). Kerja sama Operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau siklus usaha dapat dilaksanakan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris, dewan Pengawas.
- (2). Kerja Sama Operasi atau Kontrak manajemen yang jangka waktunya lebih dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3). Jawaban Menteri atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonannya diterima.

Bagian Ketiga
Konsolidasi, Merger dan Pemecahan

Pasal 10

- (1). Konsolidasi atau merger dilakukan untuk meningkatkan modal usaha, memperluas pangsa pasar serta meningkatkan daya saing usaha.
- (2). Pemecahan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat pengendalian intern serta meningkatkan pelayanan usaha.

Pasal 11

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) konsolidasi, merger dan pemecahan dilakukan dengan cara :

- a. Menteri mengeluarkan persetujuan mengenai konsolidasi, merger dan pemecahan BUMN yang bersangkutan;
- b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa untuk BUMN yang berbentuk PERSERO atau Rapat Bersama antara Menteri Teknis dengan Menteri untuk BUMN yang berbentuk Perum.
- c. menteri menyelesaikan konsolidasi, merger dan pemecahan BUMN yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penjualan saham

Pasal 12

Penjualan saham BUMN dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dan atau mendukung pengembangan usaha serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pemilikan dan pengawasan BUMN

Pasal 13

- (1). Penjualan saham BUMN hanya dilakukan melalui pasar modal yang sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (2). Penjualan saham BUMN melalui penempatan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

- (1). Menteri mengeluarkan persetujuan tentang penjualan saham BUMN dengan menetapkan cara penjualannya melalui pasar modal atau penempatan langsung.
- (2). Penjualan saham BUMN melalui penetapan langsung diatur secara tersendiri oleh Menteri
- (3). Pelaksanaan penjualan saham BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembentukan Perusahaan Patungan

Pasal 15

BUMN dapat membentuk perusahaan patungan dengan pihak lain, untuk meningkatkan pangsa pasar, kemampuan teknologi/operasi dan memperbaiki tingkat pengembalian modal.

Pasal 16

- (1). Menteri mengeluarkan persetujuan mengenai pembentukan perusahaan patungan berdasarkan hasil penilaian atau usulan pembentukan perusahaan patungan tersebut.
- (2). Jawaban Menteri atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonannya diterima.
- (3). Pelaksanaan pembentukan perusahaan patungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian keenam

Penjualan Perusahaan dan likuidasi

Pasal 17

Apabila berdasarkan penilaian tidak dimungkinkan memperbaiki kondisi BUMN dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 15 Keputusan ini, maka BUMN yang bersangkutan dijual atau dilikuidasi.

Pasal 18

Pelaksanaan penjualan perusahaan dan likuidasi BUMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 19**

Ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini, berlaku pula bagi Anak Perusahaan BUMN dengan meningkatkan ketentuan yang berlaku bagi Anak Perusahaan BUMN.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur secara tersendiri oleh Menteri

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 1989
MENTERI KEUANGAN

Ttd

J.B SUMARLIN